

EFEKTIFKAN PEMANFAATAN PENGELOLAAN ADUAN, OMBUDSMAN RI GELAR WORKSHOP PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK

Selasa, 28 September 2021 - Abdul Muhamin

Batam - Anggota Ombudsman RI Jemsly Hutabarat memberikan sambutan pada kegiatan Workshop Pengelolaan Pelayanan Publik yang Baik yang diselenggarakan oleh Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau, pada Rabu (29/9/2021) di Hotel Best Western Panbil Batam. Workshop ini diikuti oleh kurang lebih 65 peserta dari berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik di Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya Jemsly menyampaikan bagaimana memberikan pelayanan publik yang prima. Ia menyebutkan tujuan pelayanan publik adalah untuk menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di negara lain pelayanan publik hanya menyejahterakan saja.

"Jadi sangat tidak bijak kalau kita melayani orang tetapi tidak meningkatkan taraf kecerdasannya, ini paling utama sekali. Karena itu kita beda dengan negara lain. Kita harus peduli dengan rakyat kita dan tidak memihak," jelasnya.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang hadir melalui daring menyambut baik kegiatan workshop ini, dengan harapan bisa mengevaluasi dan lebih meningkatkan pengelolaan pelayanan publik yang baik untuk ke depannya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasakan dampak yang nyata dari pembangunan yang dilakukan.

"Pemprov Kepri juga memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pola-pola pelayanan terus kita kembangkan dengan sistem digital agar supaya transparansi, efisiensi dan efektifitas pelayanan dapat menjamin itu semua, dan juga merupakan indikator mengurangi angka indeks korupsi di Kepri," ujar Ansar.

Selanjutnya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau Lagat Parroha Patar Siadari menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan untuk mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan aduan pada tiap instansi penyelenggara pelayanan publik yang ada di Kepulaun Riau.

"Ke depan diharapkan ada perubahan budaya pelayanan publik di instansi-instansi atau lembaga yang ada," tutup Lagat. (AM)